BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-609 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 747 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan asumsi kebutuhan daerah dan penyesuaian terhadap dinamika peraturan perundang-undangan, maka rancangan peraturan kepala daerah yang sudah diprogramkan dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Belitung Timur Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 747 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 747 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Belitung Timur Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 OKTOBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-609 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 OKTOBER 2023

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

NO.	JUDUL PERBUP	MATERI YANG DIATUR	DASAR HUKUM	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PENGAJUAN	STATUS PERBUP		KET
						BARU	REVISI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	1. Ketentuan umum 2. Maksud, Tujuan dan Sasaran 3. Ruang Lingkup 4. Prinsip dan Manfaat 5. Perencanaan SKM 6. Pelaksanaan SKM 7. SKM Berbasis Elektronik 8. Publikasi, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi	1. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Triwulan I	√	-	-
2.	Pedoman Pengelolaan Risiko	Pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Triwulan I	√	-	-
3.	Pedoman Pemeriksaan Kinerja	Pedoman Pemeriksaan Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah	1. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP 2. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Triwulan I	√	-	-
4.	Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1. PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain 2. Permendagri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Inspektorat	Triwulan I	√	-	-
5.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa	Perubahan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa	Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemiihan Kepala Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Triwulan I	-	√	

6.	Pedoman Pemberian Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Pedoman pemberian dana bantuan keuangan biaya pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa yang bersumber APBD TA.2023	Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pemilihan Kepala Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Triwulan I	√	-	
7.	Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Triwulan I	√	-	
8.	Penghasilan Dewan pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur	1. Penghasilan Dewan Pengawas 2. Penghasilan Direksi 3. Penghasilan Pegawai	Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA	Triwulan I	√	-	-
9.	Perubahan Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA	Triwulan I	-	√	
10.	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014	Bagian Hukum	Triwulan I	√	-	-
11.	Perpustakaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Perpustakaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014	Bagian Hukum	Triwulan I	√	-	-

12.	Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	1. Ketentuan umum 2. Ruang Lingkup 3. Bantuan Hukum 4. Kerja Sama bantuan hukum 5. Pemberian Bantuan Hukum 6. Permohonan Bantuan Hukum 7. Penyaluran Dana Bantuan Hukum 8. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran 9. Pengawasan dan Evaluasi 10. Sanksi Administrasi	Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.	Bagian Hh bv ukum	Triwulan I	√	-	-
13.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Perubahan Tunjangan Transfortasi dan Tunjangan Perumahan	PP Nomor 18 Tahun 2017	Sekretariat DPRD	Triwulan I	√	-	
14.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD	Perubahan Besaran Kompensasi	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota	Sekretariat DPRD	Triwulan I	-	√	
15.	Pemberian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP melalui APBD Kabupaten Belitung Timur	Pengelolaan pemberian bantuan BOS SD, SMP dan BOS PAUD	Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Tmur Nomor 1 Tahun 2017	Dinas Pendidikan	Triwulan I	√	-	
16.	Standar Harga Satuan Tahun 2024	Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2024	Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan Daerah	BPKPD	Triwulan I	√	-	
17.	Analisa Standar Belanja Tahun 2024	Analisa Standar Belanja Tahun 2024	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020	BPKPD	Triwulan 1	√	-	

18.	Perubahan Atas Perbup Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur	Perubahan Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Nomor 12 Tahun 2015 Perda Kab.Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015	BPKPD	Triwulan I	-	√	
19.	Tata Cara Pemakaian Rumah Dinas Daerah	Tata Cara Pemakaian Rumah Dinas Daerah	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Nomor 12 Tahun 2015 Perda Kab.Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015	BPKPD	Triwulan I	√	-	Mencabut Perbup Nomor 36 Tahun 2011
20.	Perubahan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur	Perubahan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah	BPKPD	Triwulan I	-	√	
21.	Sistem dan Prosedur Penatausahaan Belanja Daerah	Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah	1. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 2. Perda 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Triwulan I	√	-	
22.	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	Perubahan Pengelolaan dan Tata Cara Hibah Bantuan Sosial	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020	BPKPD	Triwulan I	-	√	
23.	Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Peserta Proyek Operasi Nasional Agraria Khusus Masyarakat Di Kabupaten Belitung Timur	Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Peserta Proyek Operasi Nasional Agraria Khusus Masyarakat Di Kabupaten Belitung Timur	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 646)	BPKPD	Triwulan I	√	-	

24.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pencatatan Kehadiran Pegawai Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Tata Cara Pencatatan dan Pengelolaan Data Kehadiran Pegawai	1. PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	BKPSDM	Triwulan I	-	√	
25.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun pengadaa 3. Keputusan Menteri dalam Negeri 900-4700 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	BKPSDM	Triwulan I	-	√	
26.	Standarisasi Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023	Standarisasi Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 2. PP Nomor 12 Tahun 2022	Badan Kesbangpol	Triwulan I	√	-	
27.	Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berbasis Kinerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur	1. tata cara identifikasi kinerja Perangkat Daerah sesuai visi dan misi Bupati; 2. tata cara identifikasi kinerja program strategis dan kegiatan sesuai sasaran dan arah kebijakan Daerah; 3. tata cara penentuan nomenklatur program strategis dan kegiatan; 4. tata cara penilaian usulan kegiatan; 5. tata cara pengukuran dan evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Bappelitbangda	Triwulan I	√	-	Tindak lanjut LHP BPK

			3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja					
28.	Inovasi Daerah	1. Ketentuan Umum Inovasi Daerah 2. Tujuan, Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah 3. Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah 4. Ujicoba Inovasi Daerah 5. Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah 6. Lomba Inovasi Daerah 7. Pembinaan dan Pengawasan Inovasi Daerah	1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah	Bappelitbangda	Triwulan I	√	-	
29.	Pedoman Pemanfaatan Sertifikat Elektronik	Pedoman Pemanfaatan Sertifikat Elektronik	1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. PP nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Diskominfo	Triwulan I	√	-	
30.	Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	1.Fungsi, Peran dan Tugas ASN 2.Jabatan ASN 3.Sistem Kerja 4.Mekanisme Kerja 5.Proses Bisnis	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.	Sekretaris Daerah (Bagian Organisasi)	Triwulan I	√	-	
31.	Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah	Rumah Sakit Umum Daerah	Triwulan I	√	-	Mencabut Perbup Nomor 54 Tahun 2018

			Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.					
32.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Perubahan Lampiran Perbup Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	DPMPTSP	Triwulan 1	-	√	
33.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklamae	Perubahan Izin Reklame	Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame	DPMPTSP	Triwulan I	-	√	-
34.	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Perubahan Lampiran Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Sekretaris Daerah (Bagian Organisasi)	Triwulan I	-	√	-

35.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Perubahan Lampiran Hasil Evaluasi Jabatan sesuai dengan Keputusan Menteri PAN RB	Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Hasil Evaluasi Jabatan	Sekretaris Daerah (Bagian Organisasi)	Triwulan I	-	√	-
36.	Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah	Pembentukan SOTK baru Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.	Sekretaris Daerah (Bagian Organisasi)	Triwulan I	√	-	-
37.	Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesbangpol	Pembentukan SOTK baru Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.	Sekretaris Daerah (Bagian Organisasi)	Triwulan I	√	-	-
38.	Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan	Perubahan SOTK	Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah (Bagian Organisasi)	Triwulan I	√	-	-
39.	Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah	Perubahan SOTK	Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah (Bagian Organisasi)	Triwulan I	√	-	-
40.	Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Penggunaan dan Penyelenggaraan penge Pemerintah Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	BPKPD	Triwulan I	√	-	-
41.	Road Map Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Tahun 2023-2026	Road Map Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Tahun 2023-2026	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sekretariat Daerah (Bagian Ekbang))	Triwulan I	√	-	-

42.	Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah	Tata cara pengelolaan pengurusan, kategori penghuni asrama, hak dan kewajiban penghuni asrama	1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sekretaris Daerah (Bagian Umum)	Triwulan II	√	-	-
43.	Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Perubahan Tunjangan Perumahan	PP 18 Tahun 2022	Sekretaris DPRD	Triwulan II	√	-	-
44.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan	Perubahan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan	PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	BKPSDM	Triwulan II	-	√	
45.	Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis	Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis urusan Agama, Pengadaan Barang dan Jasa, Agraria dan Tata Ruang, ESDM, Penanggulangan Bencana, pencarian dan pertolongan penelitian, pengkajian dan pengembangan daerah, pemuda dan olahraga, persandian dan statistic	Perda Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	DISPUS	Triwulan II	√	-	-

46.	Pedoman Alih Media	Pedoman arsip alih media	Perda Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	DISPUS	Triwulan II	√	-	-
47.	Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga	Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga	Perda Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	DISPUS	Triwulan II	√	-	-
48.	Pedoman Penanganan Fraud di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Pedoman Penanganan Fraud di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	1. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP	Inspektorat	Triwulan II	√	-	-
49.	Pedoman Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pedoman Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TIPIKOR 2. Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah	Inspektorat	Triwulan II	√	-	-
50.	Penataan Dusun	Pengaturan dan tatacara penataan dusun	Pemendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Triwulan II	√	-	-
51.	Badan Permusyawaratan Desa	Pengaturan pemilihan, pelantikan, pemberhentian, fungsi serta hak, kewajiban BPD dan larangan anggota BPD	1. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Triwulan II	√	-	Pelaksanaan amanat Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang BPD
52.	Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah	Pembentukan Produk Hukum Daerah	UU Nomor 12 Tahun 2011 Jo UU 13 Tahun 2022 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 jo Permendagri Nomor 120 Tahun 2018	Bagian Hukum	Triwulan II	√	-	-

53.	Pedoman Tata Cara Penyusunan Kerangka Acuan Kerja	Penyusunan KAK Perencanaan dan KAK Pengadaan Barang dan Jasa	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018	Bappelitbangda	Triwulan II	√	-	Tindak lanjut LHP BPK
54.	Implementasi e-Monev	1. Penggunaan aplikasi e-Monev untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada perangkat daerah 2. Penggunaan aplikasi e-Monev untuk evaluasi kinerja perangkat daerah dan individu	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah	Bappelitbangda	Triwulan II	√	-	
55.	Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Perencanaan di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	1. Penggunaan SIPD dalam proses perencanaan 2. Penggunaan SIPD untuk pengusulan aspirasi masyarakat, lembaga, perorangan, dan POKIR DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Bappelitbangda	Triwulan II	√	-	
56.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	Penetapan RKPD Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Bappelitbangda	Triwulan II	√	-	Perbup Rutin

57.	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Kabupaten Belitung Timur	Upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan kasus gawatdarurat medis (medical emergency) diwilayah Kabupaten Belitung Timur	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor19 Tahun2016 tentang Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Triwulan II	√	-	-
58.	Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kabupaten Belitung Timur	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Tujuan Puskesmas sebagai BLUD untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada masyarakat, berupa penyediaan pelayanan kesehatan yang didasarkan prinsip efisiensi, produksi dan penerapan praktik bisnis yang sehat dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timujr	Triwulan II	√	-	-
59.	Program Inovasi Yuk Gi Nyelik Pasien	penyelenggaraan Program Yuk Gi Nyelik Pasien di Kabupatan Belitung Timur	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timujr	Triwulan II	√	-	-
60.	Pengelolaan Penyertaan Modal	Pengelolaan Penyertaan Modal	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Triwulan II	√	-	-

61.	Jadwal Retensi Arsip	Jadwal retensi arsip urusan Agama, Pengadaan Barang dan Jasa, Agraria dan Tata Ruang, ESDM, Penanggulangan Bencana, pencarian dan pertolongan penelitian, pengkajian dan pengembangan daerah, pemuda dan olahraga, persandian dan statistik	1. Perda Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan 2. Perka Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyusunan JRA	DISPUS	Triwulan III	√	-	-
62.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Perubahan Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan	1. PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara	BKPSDM	Triwulan III	-	√	
63.	Pedoman Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigasi bagi APIP di lingkungan Inspektorat Daerah Belitung Timur	Tata cara pemeriksaan dengan tujuan tertentu bidang investigasi bagi APIP di lingkungan Inspektorat Daerah Belitung Timur	1. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP	Inspektorat	Triwulan III	√	-	-
64.	Cuti Perangkat Desa	Pengaturan hak cuti perangkat desa	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 PP nomor 43 Tahun 2014	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Triwulan III	√	-	-
65.	ADD-P Tahun Anggaran 2023	Pengaturan besaran, tatacara dan syarat Alokasi dana desa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengeloaan Keungan Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Triwulan III	-	√	Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana

								Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Desa Tahun 2022
66.	Penambahan Nama pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur	Penambahan Nama pada Perumda Air Minum Kabupaten Belitung Timur	Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA	Triwulan III	√	-	-
67.	Perubahan Atas Perbup tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024	Perubahan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2024	Perda Kab. Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Triwulan III	-	√	
68.	Bagi Hasil Pajak Ke Desa	Pedoman Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	BPKPD	Triwulan III	√	-	
69.	Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022	Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2022	UU, PP, Permendagri, Perda, Perbup terkait	BPKPD	Triwulan III	√	-	
70.	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional	BPKPD	Triwulan III	-	√	

71.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 2.Koordinator dan Unit Pengelola LHKASN 3.Pembinaan dan Pengawasan 4.Sanksi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	INSPEKTORAT DAERAH	Triwulan III	√	-	
72.	Tata Cara Penyampaian Dan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyampaian Dan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	INSPEKTORAT DAERAH	Triwulan III	-	√	
73.	Pedoman Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah	Pedoman Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	INSPEKTORAT DAERAH	Triwulan III	√	-	
74.	Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	DPMPTSP	Triwulan III	√	-	
75.	Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Komunitas Belajar	Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Komunitas Belajar	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan	Dinas Pendidikan	Triwulan III	√	-	
76.	Penyeleggaraan Program Merdeka Belajar Pada Satuan Penddikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	Penyeleggaraan Program Merdeka Belajar Pada Satuan Penddikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan	Dinas Pendidikan	Triwulan III	√	-	
77.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Pedoman Pengadaan Aparatur Sipil Negara	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	BKPSDM	Triwulan III	√	-	

			3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					
78.	Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai NegerI Sipil Di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya; 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Standar Jompetensi Jabatan Fungsional Assesor Sumber Daya Aparatur.	BKPSDM	Triwulan III	√	-	
79.	Penilaian Kinerja Pegawai Di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Penilaian Kinerja Pegawai Di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;	BKPSDM	Triwulan III	√	-	

			2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.					
80.	Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil	Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil	BKPSDM	Triwulan III	√	-	
81.	Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	BKPSDM	Triwulan III	√	-	
82.	Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka dan Kompetitif	Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka dan Kompetitif	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Daerah	BKPSDM	Triwulan III	√	-	
83.	Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein	Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	RSUD	Triwulan III	√	-	

84.	Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein	Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	RSUD	Triwulan III	√	-	
85.	Kebijakan Akuntasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein	Kebijakan Akuntasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	RSUD	Triwulan III	√	-	
86.	Peta Jabatan Perangkat Daerah	Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah	Bagian Organisasi	Triwulan III	-	√	
87.	Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024	Perubahan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2024	Bagian Organisasi	Triwulan III	-	√	
88.	Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	Perda Nomor 1 Tahun 2018	Badan Kesbangpol	Triwulan III	√	-	Untuk Pelaksanaan Kegiatan RANP4GN di Belitung Timur

89.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023	Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2023	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Bappelitbangda	Triwulan III	√	-	Perbup Rutin
90.	Jaringan Pengaman Sosial (JPS)	1. Ketentuan Umum 2. Kriteria JPS 3. JPS Bidang Kesehatan 4. JPS Bidang Pendidikan 5. JPS Bidang Sosial 6. Besaran JPS 7. Mekanisme Pengajuan JPS 8. Persyaratan Administrasi JPS Bidang Kesehatan 9. Persyaratan Administrasi JPS Bidang Pendidikan 10. Persyaratan Administrasi JPS Bidang Sosial 11. Penyerahan JPS 12. Pelaporan	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan	Bappelitbangda	Triwulan III	√	-	
91.	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023-2043	Rencana Detail Tata Ruang	1. PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Triwulan IV	√	-	-
92.	Pedoman Penyusunan APBDes T.A 2024	Tata cara penyusunan APBDes	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Triwulan IV	-	√	Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2022

								tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
93.	ADD T.A 2024	Pengaturan besaran, tatacara dan syarat Alokasi dana desa	Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Triwulan IV	√	-	-
94.	Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur	1. Pengangkatan Dewan Pengawas 2. Seleksi Dewan Pengawas 3. Pengangkatan Direksi 4. Seleksi Direksi	Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA	Triwulan IV	-	√	-
95.	Kerjasama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur	Kerjasama Perumda Air Minum	Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA	Triwulan IV	√	-	-
96.	Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur	Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Air Minum	Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA	Triwulan IV	√	-	-
97.	Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur	Tarif Air Minum	Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA	Triwulan IV	√	-	-

98.	Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Penatausahaan dan Inventarisasi BMD	Permendagri Nomor 47 Tahun 2021	BPKPD	Triwulan IV	√	-	
99.	Kebijakan Akuntansi Aset Biologis	Penyajian Asset Biologis Dalam Neraca	Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keuangan Daerah	BPKPD	Triwulan IV	√	-	
100.	Pajak Reklame	1. Nilai Sewa Reklame 2. Sistem Prosedur Pendataan, Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Reklame	UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	BPKPD	Triwulan IV	√	-	
101.	Pajak MBLB	Sistem dan Prosedur Pembayaran Pajak MBLB	UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	BPKPD	Triwulan IV	√	-	
102.	Pajak Sarang Burung Walet	1. Sistem dan Prosedur Pendataan, Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet 2. Harga pasaran umum	UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	BPKPD	Triwulan IV	√	-	
103.	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1. Klasifikasi dan besaran NJOP 2. Sitem dan Prosedur Pendataan, Pendaftaran, serta Pembayaran Pajak PBB-P2	UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	BPKPD	Triwulan IV	√	-	
104.	Pajak BPHTB	Sistem dan Prosedur Pengisian dan Pembayaran Pajak BPHTB	UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	BPKPD	Triwulan IV	√	-	
105.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Sistem dan Prosedur Pendataan, Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu	UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	BPKPD	Triwulan IV	√	-	
106.	Program *The Outstanding Millenials For Aquaculture Innovation* (Milenial Unggul Untuk Inovasi Pembudidayaan Ikan) Dan Program Budidaya Untuk Ketahanan Pangan	Program *The Outstanding Millenials For Aquaculture Innovation* (Milenial Unggul Untuk Inovasi Pembudidayaan Ikan) Dan Program Budidaya Untuk Ketahanan Pangan	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan	Dinas Perikanan	Triwulan IV	√	-	

107.	Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Penghapusan Sanksi Administrasi	Perda Nomor 2 Tahun 2011 Jo Perda Nomor 13 Tahun 2016	BPKPD	Triwulan IV	√	-	
108.	Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Penghapusan Sanksi Administrasi	Perda Nomor 2 Tahun 2011 Jo Perda Nomor 13 Tahun 2016	BPKPD	Triwulan IV	√	-	
109.	Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara	Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Triwulan IV	-	√	
110.	Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara	1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	BKPSDM	Triwulan IV	-	√	
111.	Sistem Informasi Manajemen Pensiun	Pedoman Usulan Pensiun	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya	BKPSDM	Triwulan IV	√	-	

			5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil					

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN